

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Anwarudin¹, Khairul Rahman², Setyo Utomo³

^{1,2,3}Pascasarjana, Universitas Islam Riau

Corresponding Author : .gmail.com¹khairul.ip@soc.uir.ac.id² setyo.utomo@soc.uir.ac.id³

Abstract

This study aims to analyze the regional government's strategy in implementing the People's Palm Oil Replanting Program (PSR) in Indragiri Hilir Regency. The program is a government initiative to improve the productivity of smallholder oil palm plantations through the replanting of old, damaged, or unproductive trees. The research method used is descriptive qualitative, with data collected through interviews, observation, and documentation. The research informants consist of officials from the Plantation Office, farmer groups, and smallholder farmers who are beneficiaries of the program. The results show that the regional government's strategy includes strengthening inter-agency coordination, providing technical assistance to farmers, facilitating access to financing through financial institutions, and supervising the implementation of the program to ensure compliance with regulations. However, the implementation still faces several challenges, such as delays in fund disbursement, limited understanding among farmers regarding administrative procedures, and overlapping land claims with protected forest areas. To overcome these issues, the regional government has adopted a collaborative approach with relevant institutions, enhanced policy socialization, and encouraged active farmer participation in every stage of implementation. In conclusion, the regional government's strategy plays a vital role in the success of the PSR program; however, greater coordination and institutional support are needed to achieve sustainable improvements in productivity and farmer welfare.

Keywords: Strategy, Regional Government, Palm Oil Replanting Program, Indragiri Hilir.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Indragiri Hilir. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat melalui peremajaan tanaman yang telah tua, rusak, atau tidak produktif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat Dinas Perkebunan, kelompok tani, serta masyarakat petani sawit penerima program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah meliputi penguatan koordinasi antarinstansi, pendampingan teknis kepada petani, penyediaan akses pembiayaan melalui lembaga keuangan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program agar sesuai dengan ketentuan. Namun, implementasi program masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan pencairan dana, minimnya pemahaman petani terhadap prosedur administrasi, dan tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan lindung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah melakukan pendekatan kolaboratif dengan lembaga terkait, memperkuat sosialisasi kebijakan, serta mendorong partisipasi aktif petani dalam setiap tahapan pelaksanaan. Kesimpulannya, strategi pemerintah daerah berperan penting dalam keberhasilan program PSR, namun diperlukan peningkatan koordinasi dan dukungan kelembagaan yang lebih optimal agar tujuan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi, Pemerintah Daerah, Peremajaan Sawit Rakyat, Indragiri Hilir.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, dan mayoritas produksi nasional berasal dari perkebunan rakyat. Namun, mayoritas perkebunan kelapa sawit rakyat berusia di atas 25 tahun, yang mengakibatkan penurunan produktivitas yang signifikan. Kondisi ini mengakibatkan hasil panen yang tidak seimbang dengan biaya produksi dan berdampak pada pendapatan petani. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah meluncurkan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) sebagai upaya strategis untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit. Program PSR merupakan bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan, meningkatkan pendapatan petani, dan mendukung komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan. Melalui program ini, petani menerima bantuan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk meremajakan tanaman yang tidak produktif. Namun, pelaksanaan program di berbagai daerah masih menghadapi kendala, mulai dari aspek administratif, koordinasi antarlembaga, keterlambatan pencairan dana, hingga masalah legalitas lahan.

Kabupaten Indragiri Hilir di Provinsi Riau merupakan salah satu daerah dengan potensi perkebunan kelapa sawit rakyat yang signifikan. Berdasarkan data Dinas Perkebunan, sebagian besar perkebunan kelapa sawit di wilayah ini telah melewati usia produktif, terutama di Kecamatan Kempas, Tempuling, dan Batang Tuaka.

Namun, pelaksanaan program dan Penghijauan (PSR) di wilayah ini belum optimal. Keterlambatan penyaluran bantuan, tumpang tindih data lahan, dan kurangnya pemahaman petani terhadap prosedur dan persyaratan program masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam mengelola dan melaksanakan program PSR perlu ditinjau kembali agar lebih efektif. Peran pemerintah daerah sangat krusial karena mereka bertindak sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lapangan. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas verifikasi lahan, pendataan petani, sosialisasi program, dan pendampingan peremajaan. Keberhasilan program PSR sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu mengembangkan strategi implementasi yang beradaptasi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan petani di wilayahnya.

Beberapa studi sebelumnya memperkuat pentingnya strategi pemerintah dalam keberhasilan PSR. Misalnya, Rambe dan Yuliana (2022) dalam Jurnal Agribisnis Indonesia menemukan bahwa efektivitas PSR sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah, koperasi, dan lembaga keuangan. Studi ini memiliki keunggulan dalam mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang terlibat dalam implementasi PSR, tetapi belum merinci bagaimana mekanisme koordinasi antar aktor tersebut diimplementasikan di tingkat daerah. Nasution dkk. (2023) dalam Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan menyatakan bahwa hambatan utama program PSR adalah lemahnya koordinasi dan ketidaksiapan petani. Studi ini

memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan di lapangan, tetapi belum menguraikan solusi pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan tersebut melalui kebijakan maupun inovasi kelembagaan. Sementara itu, Syafrudin dan Sari (2021) dalam Jurnal Pembangunan Berkelanjutan menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dan komunikasi intensif untuk meningkatkan partisipasi petani dalam program PSR. Kekuatan studi ini terletak pada pemahamannya tentang aspek sosial dan komunikasi, tetapi kelemahannya adalah tidak menghubungkan variabel partisipasi petani secara komprehensif dengan efektivitas strategi pemerintah daerah. Penelitian Fitri dan Adi (2024) dalam Jurnal Kebijakan Perkebunan dan Pertanian Berkelanjutan menjelaskan bahwa dukungan pemerintah daerah melalui bimbingan teknis dan penyederhanaan prosedur administratif dapat meningkatkan efektivitas implementasi PSR di tingkat kabupaten. Meskipun temuan ini relevan, studi ini lebih berfokus pada aspek administratif tanpa mengkaji koordinasi lintas sektor dan dinamika kelembagaan lokal yang memengaruhi keberlanjutan program. Lebih lanjut, studi Rizki dan Nurhalimah (2023) menambahkan bahwa keberhasilan PSR juga dipengaruhi oleh strategi sosialisasi dan transparansi penggunaan dana peremajaan yang diterapkan oleh instansi terkait. Studi ini memiliki keunggulan dalam menyoroti pentingnya akuntabilitas, tetapi gagal menghubungkan bagaimana strategi komunikasi pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan dan partisipasi petani dalam jangka panjang.

Berdasarkan tinjauan ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan dalam implementasi strategi pemerintah daerah secara holistik, terutama dalam konteks lokal dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang beragam. Hanya sedikit penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana strategi pemerintah daerah dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam menerapkan PSR di wilayah dengan tantangan spesifik seperti Kabupaten Indragiri Hilir, yang memiliki wilayah yang luas, topografi yang beragam, dan tumpang tindih dengan hutan lindung.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kajian pustaka sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Indragiri Hilir masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, maupun rendahnya kapasitas petani dalam memahami mekanisme program. Penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas PSR dari perspektif kebijakan dan administrasi, namun masih terdapat kesenjangan penelitian dalam mengkaji bagaimana strategi pemerintah daerah dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi secara komprehensif sesuai dengan kondisi sosial ekonomi setempat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam implementasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya, serta menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam

mengoptimalkan implementasi PSR agar lebih efektif dan berkelanjutan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut?
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan PSR agar lebih efektif dan berkelanjutan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang strategi pemerintah daerah dalam melaksanakan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Indragiri Hilir. Pendekatan ini dipilih karena isu yang diteliti berkaitan dengan proses kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan dinamika sosial antara pemerintah dan masyarakat petani, yang lebih mudah dijelaskan melalui data kualitatif daripada data numerik.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan fokus pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, lembaga pelaksana utama program PSR. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah dengan luas perkebunan kelapa sawit rakyat yang signifikan dan menjadi target utama pelaksanaan PSR.

Periode penelitian berlangsung selama empat bulan, mulai dari persiapan, pengumpulan data, hingga analisis.

Jenis dan Sumber Data, Data yang digunakan terdiri dari: Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dan observasi lapangan. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari dokumen pemerintah, laporan Dinas Perkebunan, publikasi BPDPKS, serta jurnal ilmiah dan literatur terkait program PSR.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Miles dan Huberman, 1992).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Studi ini menemukan bahwa pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah daerah, melalui Dinas Perkebunan, memainkan peran strategis dalam memastikan program ini sesuai dengan pedoman nasional, tetapi masih menghadapi sejumlah tantangan administratif dan teknis. Untuk menganalisis strategi ini, kami menggunakan teori Hunger & Wheelen (2012), yang menjelaskan bahwa sebuah strategi terdiri dari empat tahap: Pengamatan lingkungan, Perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian.

Pengamatan lingkungan

Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Dinas Perkebunan, melakukan Pengamatan lingkungan sebagai langkah awal pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR). Pengamatan lingkungan ini meliputi identifikasi kondisi lahan, umur tanaman, tingkat produktivitas, dan kesiapan kelembagaan kelompok tani. Ditemukan bahwa sebagian besar perkebunan kelapa sawit rakyat di Indragiri Hilir berusia di atas 25 tahun dan memiliki produktivitas rendah, berkisar antara 8–10 ton tandan buah segar (TBS) per hektar per tahun, jauh di bawah standar produktivitas nasional. Selain faktor teknis, observasi juga dilakukan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak petani masih mengandalkan kelapa sawit sebagai sumber pendapatan utama, sehingga mereka ragu untuk melakukan peremajaan karena takut kehilangan pendapatan sambil menunggu tanaman baru. Pemerintah daerah juga mengidentifikasi hambatan administratif seperti legalitas lahan dan kurangnya pemahaman petani tentang prosedur PSR. Temuan ini sejalan dengan Nasution dkk. (2023), yang menekankan bahwa kesiapan petani yang lemah dan status lahan yang tidak pasti merupakan faktor penghambat utama PSR. Dari perspektif teori Hunger & Wheelen, tahap ini mencerminkan proses Pengamatan lingkungan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal dalam pelaksanaan PSR. Proses ini menjadi dasar penting untuk mengembangkan strategi yang relevan

dengan kondisi lokal Kabupaten Indragiri Hilir.

Perumusan Strategi

Setelah melakukan kajian lingkungan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir merumuskan beberapa strategi untuk mempercepat pelaksanaan PSR. Strategi-strategi tersebut meliputi: Meningkatkan koordinasi lintas instansi antara Dinas Perkebunan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), lembaga perbankan, dan kelompok tani. Menyederhanakan mekanisme verifikasi administratif untuk mempercepat proses pengajuan bantuan PSR. Memberikan bantuan teknis dan sosialisasi intensif kepada petani untuk memastikan mereka memahami manfaat, prosedur, dan tanggung jawab program peremajaan. Memperkuat kelembagaan petani melalui pembentukan koperasi sebagai wadah pengelolaan dana dan pengawasan pelaksanaan PSR. Perumusan strategi ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian lingkungan dan potensi sumber daya lokal. Sejalan dengan Fitri dan Adi (2024), dukungan teknis dan penyederhanaan administratif pemerintah daerah telah terbukti meningkatkan efektivitas program PSR di tingkat kabupaten. Menurut Hunger & Wheelen, tahap ini merupakan proses pemilihan tindakan strategis yang paling tepat berdasarkan hasil kajian lingkungan. Dalam konteks Indragiri Hilir, strategi difokuskan pada sinergi kelembagaan dan pemberdayaan petani untuk memastikan keberlanjutan program.

Implementasi Strategi

Implementasi strategi dilakukan melalui beberapa tahapan operasional yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah daerah, melalui Dinas Perkebunan, bertindak sebagai koordinator teknis, memastikan proses sosialisasi, verifikasi lahan, dan penyaluran dana PSR berjalan sesuai pedoman. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan lembaga keuangan (seperti Bank BRI dan Bank Riau Kepri) untuk menyalurkan bantuan keuangan kepada kelompok tani yang memenuhi syarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun strategi implementasi telah disusun dengan baik, beberapa kendala masih ditemukan di lapangan. Kendala-kendala tersebut antara lain keterlambatan pencairan dana, kurangnya sumber daya manusia pendamping, dan kurangnya pemahaman petani terhadap prosedur administrasi. Beberapa petani juga menghadapi masalah tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan lindung, yang menghambat persetujuan proposal PSR. Hal ini sejalan dengan temuan Rambe dan Yuliana (2022), yang menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam memfasilitasi implementasi PSR. Dalam kerangka teori Hunger & Wheelen, implementasi strategi merupakan tahap krusial karena berkaitan dengan implementasi kebijakan dan mobilisasi sumber daya. Efektivitas strategi PSR di Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah untuk mengoordinasikan berbagai aktor dan mengadaptasi kebijakan pusat dengan realitas lapangan.

Evaluasi dan Pengendalian

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan PSR. Evaluasi ini meliputi pemantauan realisasi fisik lahan replanting, efektivitas pemanfaatan dana, dan tingkat partisipasi petani. Wawancara mengungkapkan bahwa evaluasi program masih menghadapi tantangan dalam hal data akurat mengenai perkembangan replanting dan pelaporan pemanfaatan dana di tingkat kelompok tani. Pemerintah daerah berupaya memperbaiki sistem pelaporan dengan melibatkan penyuluh lapangan dan membentuk tim pemantauan terpadu. Upaya pengendalian dilakukan melalui supervisi lapangan dan koordinasi dengan BDPDKS (Badan Perkebunan dan Petani Rakyat) serta lembaga keuangan. Namun, sistem evaluasi belum sepenuhnya berbasis digital, sehingga sering terjadi keterlambatan pelaporan. Hal ini menyoroti perlunya inovasi dalam pemantauan digital untuk mengukur efektivitas program dengan lebih baik. Menurut teori Hunger & Wheelen, fase evaluasi dan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Daerah untuk Implementasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan teori Hunger & Wheelen (2012), tahap pertama dalam penyusunan strategi adalah Pengamatan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, melalui Dinas Perkebunan, mengidentifikasi kondisi lapangan terkait luas areal perkebunan kelapa

sawit rakyat yang belum produktif, umur perkebunan, dan status kepemilikan lahan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Kempas berusia di atas 25 tahun dan mengalami penurunan produktivitas yang signifikan. Selain itu, teridentifikasi pula permasalahan legalitas lahan, karena beberapa perkebunan berada di kawasan hutan lindung. Pada tahap perumusan strategi, pemerintah daerah menetapkan langkah-langkah kunci untuk mendukung Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR), termasuk meningkatkan koordinasi lintas sektor antara Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, lembaga keuangan (Bank BRI dan BPDPKS), dan kelompok tani. Pemerintah juga merumuskan kebijakan untuk memberikan bantuan administratif kepada petani guna memastikan mereka memenuhi persyaratan program PSR. Selanjutnya, dalam tahap implementasi strategi, pemerintah daerah mendistribusikan program bantuan benih berkualitas tinggi, memberikan pelatihan teknis budidaya kelapa sawit berkelanjutan, dan memfasilitasi pengajuan hibah PSR kepada lembaga keuangan. Kegiatan penjangkauan intensif dilakukan di tingkat kecamatan dan desa untuk memastikan petani memahami mekanisme program. Terakhir, tahap evaluasi dan pengendalian dilakukan melalui pemantauan lapangan oleh tim teknis Dinas Perkebunan dan pelaporan berkala dari kelompok tani penerima. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan penyaluran dana tepat sasaran dan menilai efektivitas program dalam meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Strategi

Faktor pendukung utama implementasi PSR di Kabupaten Indragiri Hilir adalah komitmen kuat pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, serta dukungan kelembagaan dari lembaga keuangan dan BPDPKS (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam penyaluran dana peremajaan. Lebih lanjut, partisipasi aktif kelompok tani dan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam bimbingan teknis sangat penting bagi kelancaran implementasi program. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat. Pertama, kendala administratif dan legalitas lahan, karena beberapa perkebunan kelapa sawit rakyat tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, sehingga memperlambat proses verifikasi. Kedua, kurangnya pemahaman petani tentang prosedur PSR, seperti kelengkapan dokumen, menyebabkan keterlambatan pencairan dana. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia di tingkat penyuluh lapangan berdampak pada belum optimalnya dukungan yang diberikan kepada kelompok tani. Faktor lainnya adalah belum optimalnya koordinasi antar instansi, terutama antara Dinas Perkebunan, dinas kehutanan, dan lembaga keuangan.

Upaya Pemerintah Daerah Optimalkan Pelaksanaan Program (PSR) untuk Efektivitas dan Keberlanjutan yang Lebih Tinggi

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah daerah menerapkan beberapa upaya strategis. Pertama, pendekatan kolaboratif sedang diterapkan, memperkuat kerja sama antara instansi teknis, lembaga

keuangan, koperasi petani, dan pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan PSR yang lebih terintegrasi. Kedua, peningkatan kapasitas petani dilakukan melalui pelatihan intensif tentang budidaya kelapa sawit berkelanjutan, pengelolaan kebun, dan pengelolaan keuangan perkebunan. Ketiga, pemerintah memperluas akses informasi digital dengan memanfaatkan sistem berbasis data terintegrasi untuk memantau perkembangan program secara real-time. Lebih lanjut, evaluasi berkala sedang dilakukan untuk menilai keberhasilan program dan meningkatkan mekanisme pelaksanaan di lapangan. Pemerintah juga memperkuat peraturan daerah untuk memastikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan PSR, termasuk peraturan tentang batas lahan dan kemitraan antara petani dan perusahaan inti. Upaya ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada aspek teknis penanaman kembali tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, pemberdayaan petani, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Mengacu pada teori Hunger & Wheelen (2012), strategi pemerintah daerah dalam pelaksanaan PSR di Kabupaten Indragiri Hilir telah mencakup seluruh tahapan strategis mulai dari pengamatan lingkungan hingga evaluasi dan pengendalian. Meskipun terdapat hambatan dalam aspek administratif dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah daerah menunjukkan adaptasi strategis melalui pendekatan kolaboratif dan peningkatan kapasitas petani. Dengan demikian, strategi yang dijalankan berpotensi meningkatkan efektivitas program PSR

secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi petani sawit di daerah.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai strategi pemerintah daerah dalam melaksanakan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Indragiri Hilir, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan telah sesuai dengan tahapan strategis yang digariskan oleh Hunger & Wheelen (2012). Pada tahap pemantauan lingkungan, pemerintah daerah berhasil mengidentifikasi berbagai kondisi lapangan, seperti usia tanaman kelapa sawit rakyat yang sudah tua, produktivitas yang rendah, dan permasalahan legalitas lahan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung. Pada tahap perumusan strategi, pemerintah daerah menetapkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan koordinasi antarlembaga, pemberian bantuan teknis kepada petani, dan memfasilitasi akses pembiayaan melalui BPD PKS (Badan Pengembangan Petani) dan lembaga keuangan. Tahap implementasi strategi meliputi pelatihan, sosialisasi, dan penyediaan benih unggul untuk mempercepat proses peremajaan. Tahap evaluasi dan pengendalian meliputi pemantauan berkala, pelaporan dari kelompok tani, dan pengawasan penyaluran dana PSR agar tepat sasaran. Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan strategi ini adalah komitmen pemerintah daerah, dukungan kelembagaan dari lembaga keuangan, dan partisipasi aktif petani. Namun, masih terdapat faktor penghambat, seperti keterlambatan pencairan dana, keterbatasan sumber daya penyuluh, dan pemahaman petani yang kurang terhadap prosedur administrasi PSR. Secara keseluruhan, strategi pemerintah daerah menunjukkan arah yang positif dalam

mendorong keberhasilan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penyederhanaan birokrasi, dan pemberdayaan petani yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan PSR tidak hanya akan meningkatkan produktivitas kelapa sawit tetapi juga secara berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat petani di Kabupaten Indragiri Hilir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) meliputi tahapan strategis sesuai teori Hunger & Wheelen (2012): pemantauan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Pemerintah daerah berperan penting dalam mengoordinasikan berbagai pihak, seperti Dinas Perkebunan, lembaga keuangan, dan kelompok tani, untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Namun, pelaksanaan PSR masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterlambatan pencairan dana, tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan lindung, dan rendahnya kapasitas petani dalam memenuhi persyaratan administrasi. Namun, terdapat pula faktor pendukung seperti komitmen pemerintah daerah, dukungan kelembagaan dari BPDPKS (Badan Keuangan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat), dan partisipasi aktif kelompok tani dalam kegiatan peremajaan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PSR,

pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan jangkauan dan bimbingan teknis kepada petani, serta memperluas akses pembiayaan melalui lembaga keuangan mitra. Pendekatan kolaboratif dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan kunci keberhasilan strategi ini sehingga program PSR tidak hanya berfokus pada peremajaan tanaman fisik, tetapi juga mampu menciptakan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang bagi petani kelapa sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga Pratama & Rahmadani Yusran. (2022). Implementasi Kebijakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Program Peremajaan Sawit Rakyat di Desa Rantau Ikil Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Pengelolaan Terapan Agribisnis & Manajemen (JPTAM)*, 6(2),
- Alamanda, A. E. (2023). Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit. *Wajah Hukum*, 7(1), 73-83
- Carolina, M. P., & Mayarni, M. (2024). Peran aktor dalam percepatan program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(1),
- Fitri, N., & Adi, R. (2024). Dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan efektivitas Program Peremajaan Sawit Rakyat di tingkat kabupaten. *Jurnal*

- Kebijakan Perkebunan dan Pertanian Berkelanjutan, 6(1), 45–57.
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2003). *Manajemen strategis*. Yogyakarta: ANDI.
- Maha Putra, R., & Wahyuni Syarfi, I. (2022). Analisis Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya (Studi Kasus Petani Penerima dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
- Miles, M. B. dan A. M. Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia
- Nasution, A., Siregar, M., & Lubis, R. (2023). *Analisis hambatan pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia*. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 13(2), 88–102.
- Rahmadini, N., & Mayarni, M. (2024). Tata kelola program peremajaan sawit rakyat (PSR) pada lahan gambut di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 22(1),
- Rahman, K. (2015). Strategi peningkatan investasi pedesaan dalam meningkatkan perekonomian desa di Provinsi Riau. *Jurnal Kajian Pemerintahan Politik dan Birokrasi*, 1(1),
- Rambe, T., & Yuliana, D. (2022). *Sinergi pemerintah daerah, koperasi, dan lembaga keuangan dalam efektivitas Program PSR*. Jurnal Agribisnis Indonesia, 10(3), 211–225.
- Rizki, A., & Nurhalimah, S. (2023). *Transparansi dana dan strategi sosialisasi dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat*. Jurnal Manajemen Agraria dan Perkebunan, 5(2), 134–147.
- Sari, B. F., & Prihatin, P. S. (2024). Implementasi program peremajaan sawit rakyat oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 3(2)
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafrudin, M., & Sari, H. (2021). *Pendekatan kolaboratif dan komunikasi intensif dalam peningkatan partisipasi petani sawit*. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 9(4),
- Wulandari, S. A., Alamsyah, Z., Napitupulu, D., & Novra, A. (2023). Strategi pendukung pelaksanaan peremajaan kelapa sawit di Provinsi Jambi. *Jurnal Mea (Media Agribisnis)*, 8(1),